

**PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**  
*(Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts  
Obscenity)*

Achmad Murtadho  
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang  
[tranetadho@gmail.com](mailto:tranetadho@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Provision of Restitution to child victims criminal acts of obscenity still passive and limited, case in Pekanbaru District Court Decision Number 13/Pid. Sus-Anak/2017 /PN.Pbr has been as a forgotten Person. The perspective of KUHAP regulations regarding restitution has weaknesses in workings of law in a responsive social reality of protecting victims, due deficiencies or obstacles in legislation so that it doesn't accommodate the rights of victims. This research types Normative. Problem is whether the victim has appropriate protection regulations on criminal justice Children and how the concept of progressive laws. The aim is to identify and formulate the concept of Child. In conclusion, First, decision case Number 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr in the paradigm of child victim protection in construction of Applicable laws and regulations. There are no articles in the Criminal Code and Procedure Code, including law enforcement policies, that is on obligations to claim for compensation in Court's decision. Second, the progressive implementation the cross-examination to giving the perspective of child victims who must be given the obligation to consider compensation in criminal justice as an additional or alternative criminal policy. Namely being imposed with the main criminal and placing the victim's perspective as one of the conditions for making Child Protection Law as well as on Sentence.*

**Keywords:** *restitution; victims child; criminal acts obscenity.*

**ABSTRAK**

Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pb yang tidak memuat kepentingan Anak Korban atau disebut sebagai *Forgotten Person*. Perspektif peraturan KUHAP serta peraturan lainnya mengenai ganti kerugian pada Hak Anak Korban memiliki kelemahan dalam bekerjanya hukum secara Responsif dengan realitas sosial perlindungan Anak Korban, karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban yang seharusnya kerugian Korban termuat pada putusan tersebut. Jenis Penelitian ini Normatif. Permasalahannya apakah peraturan perlindungan korban telah sesuai pada peradilan pidana Anak dan bagaimana konsep hukum secara progresifnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi serta merumuskan konsep Undang-Undang Perlindungan Anak melalui putusan Pengadilan. Kesimpulannya *Pertama*, Putusan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dalam paradigma perlindungan Korban Anak telah dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu belum adanya pasal pada KUHAP dan KUHAP termasuk kebijakan penegakkan hukum yaitu pada kewajiban untuk memberikan tuntutan ganti kerugian pada putusan Pengadilan. *Kedua*, secara progresif diberlakukannya *cross examination* dengan memberi perspektif Anak Korban yang harus diberi kewajiban dalam mempertimbangkan ganti kerugian pada peradilan pidana sebagai kebijakan pidana tambahan atau alternatif yaitu dijatuhkan bersama pidana pokok dan menempatkan persepektif korban sebagai salah satu syarat pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pada Putusan Pengadilan.

**Kata kunci:** ganti kerugian; anak korban; tindak pidana pencabulan.

## PENDAHULUAN

Selama ini Peneliti belum pernah menemukan artikel, jurnal atau penelitian yang membahas mengenai Ganti Kerugian Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan dengan konsep hukum progresif melalui putusan Pengadilan. Namun berikut penelitian yang pernah membahas tentang ganti kerugian atau mengenai perlindungan terhadap Korban Anak. Berikut kesamaan dengan penelitian terdahulu namun terdapat perbedaan bahasan :

Penelitian mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan perangkat dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Seperti halnya pada naskah publikasi yang berjudul Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen) oleh Ratna Prawati pada kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual di Kabupaten Sragen banyak melibatkan korban anak di bawah umur. Berdasarkan catatan, jumlah korban anak di bawah umur mengalami peningkatan hampir 200 persen. Sepanjang tahun 2010, jumlah anak yang menjadi korban hanya terdapat 13 Anaksementara tahun 2011 melonjak menjadi 33 anak.<sup>1</sup> Wujud perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan masih jauh dari harapan, sistem pemidanaan dalam KUHP tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan/kekerasan yang berhubungan dengan kesusilaan. Belum adanya suatu wadah khusus yang secara nasional untuk menangani masalah tindak kekerasan terhadap anak perempuan. Sehingga secara Represif diperlukan perlindungan hukum. Kesimpulannya berupa dampak secara represif dari perlindungan Korban serta berupa saran bagi penegak hukum tanpa ada konsep hukum yang diterapkan.

Selanjutnya terdapat sebuah putusan pengadilan yang menunjukkan kepentingan korban atau hak-hak korban tidak diperhatikan yaitu pada penelitian tesis Yang disusun oleh M. Choirul Huda. S.H dengan Putusan PN

Yogyakarta Nomor 158/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016 atas tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan orang lain mati Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Purnama als. Konyak Bin Parjio dengan pidana penjara selama 4 (empat).<sup>2</sup> Pada Putusan tersebut juga tidak memperhatikan keadaan atau penderitaan yang di alami oleh korban di dalam putusan kasus pidana. Korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang telah dirasakan atau diderita korban bahkan hak-hak korban tidak diperhatikan, yang seharusnya putusan hakim termuat bahwa terdakwa atau terpidana menanggung penderitaan korban baik secara materiil atau immateriil. Pada kajian ini memiliki kesamaan dari penelitian tesis Yang disusun oleh M. Choirul Huda yaitu sama-sama membahas mengenai pemenuhan ganti kerugian dan berangkat dari kasus putusan namun perbedaannya dengan artikel yang dibahas Peneliti yaitu peneliti hanya memfokuskan pada Ganti Kerugian Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan sedangkan tesis disusun oleh M. Choirul Huda tersebut bukan ditujukan kepada Anak selain itu konsep hukum progresif yang digunakan berbeda yang pada kesimpulannya hanya berupa tanggapan dan saran kepada penegak hukum tanpa ada konsep hukum yang akan diterapkan.

Selanjutnya pada Jurnal/karya ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif karya Irwan Safaruddin Harahap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang menerangkan bahwa perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak Anak yang dilanggar yang dilakukan oleh Negara, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal Anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama, bangsa dan Negara. Indonesia sebagai Negara hokum berdasarkan Pancasila haruslah

---

<sup>1</sup> Ratna Prawati, Naskah Publikasi, <http://eprints.ums.ac.id/38547/1/9RR.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, *Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen)*. Hlm 27-28.

---

<sup>2</sup> Huda, Muhammad Khoirul. "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan ditinjau Dari Hukum Progresif." *Tesis Universitas Islam Indonesia Fkultas Hukum*, 2018: 1.

memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Propinsi Sumatera Utara Secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis sehingga akan tampak lebih konkret. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Hal ini berbeda dengan kajian ini, kajian karya Irwan Safaruddin Harahap yang pada kesimpulannya hanya berupa tanggapan dan saran-saran seperti dengan menetapkan kejahatan seksual di sumatra utara pada tahun 2014 ditunjuk sebagai darurat kejahatan seksual dan tanpa ada konsep hukum yang akan diterapkan secara progressif.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa. Adapun perlindungan bagi anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Pelindungan terhadap Anak hakekatnya termuat pada anak yang berhadapan dengan peradilan pidana serta anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai Pelaku maupun Korban. Pada Peraturan Perlindungan Anak bahwa Sistem Peradilan Anak telah mengatur tentang hak-hak Pelaku Tindak Pidana pada Anak yang berhadapan dengan Hukum bagi Pelaku terdapat beberapa macam perlindungan dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara *Diversi*<sup>4</sup> maupun penyelesaian perkara secara

*Restoratif*<sup>5</sup>. Sedangkan Hak-hak Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.<sup>6</sup>

Dengan hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi Anak yang secara substantif telah mengatur beberapahal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasiekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korbankerusakan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak yang sedang dalam situasikonflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan padaprinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaanterhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk wujud dalam perlindungan terhadap Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telahmendapatkan kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak pada tahun 2011-2020 dengan jumlah 1043.<sup>8</sup> Dan

---

luar peradilan pidana, Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

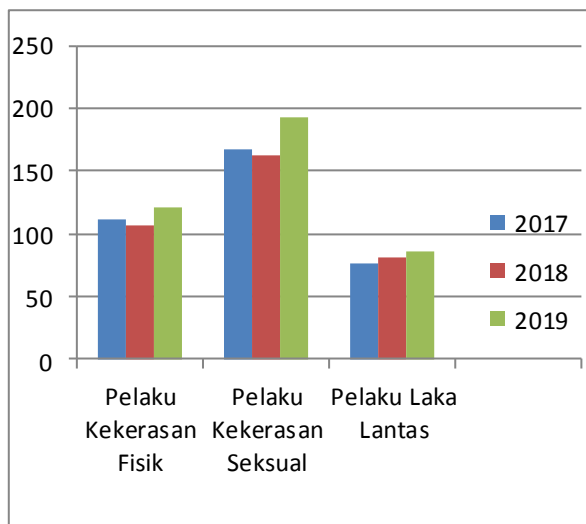
<sup>8</sup> Seminar KPAI yang berjudul *Peran KPAI Dalam Perlindungan Anak* Oleh Rita Pranawati, MA, Pada tanggal 25 Juli 2020.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomer 2.

<sup>4</sup> Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di

berikut juga data mengenai data Pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelaku laka lantas dari tahun 2017, 2018, 2019 yang melibatkan Anak..

Tabel 1  
Data mengenai data Pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelaku laka lantas



Sumber : Seminar Zoom KPAI 25 Juli 2020  
Data mengenai Pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelaku laka lantas dari tahun 2017, 2018, 2019.<sup>9</sup>

Dari beberapa kekerasan tersebut terdapat peningkatan yang cukup drastis pada Pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap Korban Anak yaitu pada kasus tindak pidana pencabulan yang merupakan kejahatan seksual dengan tergolong sebagai kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Penderitaan Korban Anak lebih berat secara psikis, fisik, dan trauma yang dialami sejak dini. Tentu penderitaan tersebut berbeda lagi dengan Korban yang sudah dewasa. Semakin meningkatnya kejahatan kasus pencabulan kepada Korban Anak, maka penegakkan peradilan harus mengantisipasinya secara efektif dan secara adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menganalisa terhadap fakta bekerjanya penegakkan hukum terhadap Korban Anak tindak pidana pencabulan, yaitu terlihat pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

menunjukkan terdapat perkara tindakan kejahatan seksual pencabulan terhadap Anak Korban yang isi pokoknya yaitu Pelaku anak yang berinisial D yang berumur 16 Tahun telah melakukan perbuatan Asusila berupa pencabulan terhadap Anak Korban Laki-Laki sebagai Korban berusia 3 (tiga) tahun. Kejadiannya yaitu pada saat Korban bermain dan Pelaku Anak D mengajaknya ke kamar. Sehingga terjadilah perbuatan pencabulan yang dilakukan Pelaku Anak dengan memasukkan kelamin Pelaku kedalam dubur Anak Korban. Dan akhirnya Korban melapor kepada orang tuanya. Pelaku ditangkap dan dilakukan penyidikan, penyelidikan, tuntutan hingga putusan pada Pengadilan negeri Pekanbaru.

Sesuai dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang memerintahkan agar Terdakwa Anak dikeluarkan dari tahanan dengan syarat khusus supaya Anak menjalani 10 (bulan) Pembinaan di dalam Lembaga Sosial dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Putusan Hakim tersebut menyatakan bersalah dan sesuai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) telah terbukti dan bersalah dalam perbuatan yang dilakukan melakukan perbuatan membujuk membiarkan anak untuk pada tindak pidana perbuatan cabul.<sup>10</sup>

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus penyelesaian perkara secara *komulatif*<sup>11</sup> dengan putusan dijatuhkannya sanksi melalui Kerja Sosial, yang dikarenakan Pelaku merupakan masuk pada usia Anak, namun pada putusan tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana cabul. Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan Asas-asas pada sistem perlindungan

<sup>9</sup> Ibid. Bidang Data KPAI

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang artinya kumulatif (tambah/ganda dalam (KBBI)) berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.



Anak atau *inkonsistensi*<sup>12</sup> dalam pelaksanaan perkara pidana terutama pada Korban pencabulan bagi Anak.

Perlindungan terhadap anak saat ini sudah sudah ada satu kerangka kerahukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Aparat Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban sehingga menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong Korban adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Pelaku Kejahatan, dan pada putusannya Hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan Pelaku dengan rumusan pasal hukum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran *materiil* sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan Hak Asasi Manusia tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak Korban. Hal ini terlihat dari putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru atau bahkan putusan perkara pidana Anak yang lainnya yang mana penegak hukum mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mengkaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya pada putusan Pengadilan. Oleh karena itu, selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap Korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat *fakultatif* yang berarti Ganti Kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau *imperatif*. Hal ini yang menjadi ketidak *inkonsistensinya* serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak.

Pemberian informasi mengenai hak Korban dapat diberikan melalui Lembaga Kepolisian serta melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) pada sejak dilakukannya penyidikan. Sedangkan, mengenai hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi maupun kompensasi tidak berdasarkan atas tugas dan

kewajiban dari lembaga Lembaga Kepolisian serta LPSK namun masih atas permohonan dari pihak Korban, atas dasar hal tersebut termuat pada Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Apabila permohonan tidak diajukan oleh pihak Anak Korban maka Lembaga Kepolisian serta LPSK akan bersifat pasif tidak akan memproses permohonan restitusi Anak Korban, yang hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagi Peneliti permasalahannya adalah Kepolisian, LPSK, Penyidik dan Penuntut Umum tidak mempunyai kewajiban atau lalai untuk memberitahukan kepada pihak Korban, dan tidak ada ketegasan pada peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak Korban untuk memperoleh hak ganti kerugian. Hal ini dapat menyebabkan anomali dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan bahkan secara keseluruhan dalam melaksanakan permohonan ganti kerugian (restitusi) melalui tahap penyidikan sampai penuntutan menjadi gugur. Sehingga, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat *inkonsistensi* yang menjadikan kekaburan hukum (*vaqueness*) pada proses peradilan Anak.

Jalur peradilan pidana Anak pada Korban Kejahatan seksual lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materiel kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis bagi diri Anak Korban. Bahwa Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan yang cenderung represif dan hanya mempertimbangkan faktor normatif hukum lainnya pada Pelaku Tindak Pidana. Dalam hal ini realitas sosial perlindungan

<sup>12</sup> Tidak selaras atau tidak sesuai asas, Surawan Maktinus, Kamus Terapan.Persada Media Pustaka, Jakarta, 2008, 30.

Anak Korban mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban. Dengan demikian akan memunculkan interpretasi. Maka berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk memilih judul **Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan**

## METODE PENELITIAN

Pada artikel ini yang digunakan penelitian adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang permasalahan yang ada pada penelitian, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan mengenai hukum yang sudah ada. Sebagai ilmu praktis normologis, pada ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu :tentang pada pembentukan hukum serta pada penerapan hukum.<sup>13</sup>

Analisis dilakukan dengan memfokuskan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbryang berkaitan dengan isu-isu atau kasus yang dihadapi yang telah menjadi produk hukum terdahulu melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sebagai alasan bahwa kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan yang cenderung putusan tersebut bersifat represif, limitatif dan hanya mempertimbangkan faktor normatif hukum lainnya pada Pelaku Kejahatan dibandingkan dengan Korban Kejahatan pada kasus Pencabulan terhadap Korban Anak. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penafsiran (interpretasi) pada peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak perlindungan korban anak, selanjutnya dilakukan konsep pada analisis terhadap kasus serta mengelompokkan data dengan mempelajari data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data dengan tehnik analisis bahan hukum interpretasi secara sistematis serta sosiologis. Proses tersebut dilakukan dengan merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang seperti disarankan oleh data secara progresif.

Kajian ini memfokuskan hukum secara progresif pada analisis putusan dengan alasan

bahwa Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memenuhi asas kepentingan terbaik pada anak serta *inkonsistensi* peraturan yang bertolak dengan realitas hukum tentang bekerjanya hukum di masyarakat. Maka proses perubahan berbasis pada kreativitas penemuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan menerapkan hukum sesuai dengan putusan hakim yang memiliki otoritas dalam mengatasi Perlindungan Korban Anak pada tindak pidana pencabulan.

## PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Hak Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam peraturan KUHP, KUHPA, Dan perundang-undangan lainnya

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.<sup>14</sup> Dalam perbuatan untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatakan sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara menggosok-gosokkan alat kelamin, mengelus-elus alat kelamin atau antar kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.<sup>15</sup>

Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Anak Korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap Korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian kompensasi pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi<sup>16</sup>, dirasa hanya sebagai formalitas saja dalam pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-haknya sebagai Anak Korban pada tindakan pidana seksual pencabulan. Secara khusus terdapat

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty. 2002), 147.

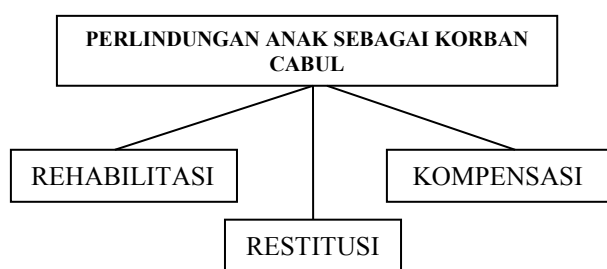
<sup>14</sup> Arif Gosita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung :Mandar Maju, 1996, 177.

<sup>15</sup> AdamiChazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Grafindo, Jakarta, 2005, 80.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa Setiap Korban yang telah mendapatkan Pelanggaran kasus HAM (hak asasi manusia) yang berat dan pada Korban tindak pidana perubuatan teror atau terorisme selain mendapatkan hak termasuk pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan juga Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi Korban pasal 7.<sup>17</sup>Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Korban dan/atau Keluarga Korban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya Pelaku.<sup>18</sup>

Tabel 2  
Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban  
Pada Sistem Peradilan Anak



Sumber : Pasal 6 & Pasal 7 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <sup>19</sup>

Perlindungan Korban pada Undang-Undang Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, serta Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Hal ini Anak

sebagai Pihak Korban dan/atau Anak berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHP telah diakomodasi perhatian terhadap Korban yakni pasal 48 ke 9. Dalam pemidanaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari tindak “Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Korban” dan/atau bagi pihak keluarga korban yang mengalami, juga harus diperhatikan bahwa RUU tentang peradilan Anak pada UU Tahun 1970 Nomer 14 merupakan dasar penyusunan setiap RUU dalam bidang peradilan. Dan hokum pidana anak di Indonesia hanya meliputi tiga pasal yaitu pasal KUHP 45, 46 dan 47. “Perlindungan Hukum terhadap Sistem Peradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan berdasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan Anak, penghargaan terhadap perilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan terhadap Anak, bimbingankepadaAnak, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan. Dilanjut pada pasal 18 Sistem Peradilan Anak UU Tahun 2002 Nomer 23 wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara. Serta pasal 90 Sistem Peradilan Anak mengenai Korban dan Saksi berhak atas:

1. Rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan social baik dalam maupun luar lembaga perlindungan Saksi dan Korban)

Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat pada pemberian Kompensasi, Restitusi Peraturan Pemerintah Tahun 2008 nomor 44. Hal tersebut tercantum pada pasal 38 dan pasal 39 bahwa bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK berdasarkan surat dokter tempat korban memperoleh perawatan serta pengobatan. Pada Undang-Undang Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak nomor 11, pasal 89 bab

<sup>17</sup> Ibid. Pasal 7

<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 penjelasan Kompensasi pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>19</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang PerlindunganSaksi Dan Korban

VII menyatakan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas segala bentuk perlindungan, upaya dalam pemulihan rehabilitasi medis serta pemulihan rehabilitasi secara sosial dengan jaminan keselamatan baik fisik (jasmani atau tubuh) pada keadaan Korban, mental terhadap Jiwa Korban maupun sosial pada masyarakat.

## 2. Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi)

Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43 mengenai “pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkan kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil<sup>20</sup> yang diderita oleh Anak Korban. Adapun hak-hak restitusi yang diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;
- c. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 7 A bahwa Korban dalam Tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa Restitusi mengenai kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan kejahatan tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis. Hal tersebut berdasarkan keputusan LPSK dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah menjadi Korban pada kejahatan tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan negeri berupa hak atas (ganti kerugian) restitusi yang

menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana.<sup>21</sup>

Secara lebih khusus Perlindungan UUPA Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Anak Korban pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Anak Korban Ayat (2) mengenai “Hak restitusi Anak Korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h”.

“Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

Sebagai bentuk penerimaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa: a) Perolehan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan secara ekonomi; b) Perolehan ganti kerugian atas penderitaan sebagai dampak akibat tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>23</sup> Bentuk ganti kerugian tersebut terdapat pada Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) Nomor 31 Tahun 2014 Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan, dan/atau ;
- c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak.



dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.<sup>24</sup>

Ketika permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, dapat diajukan melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui proses penyidikan atau penuntutan.<sup>25</sup> Pada tahap permohonan restitusi sebelum putusan yaitu pada penyidikan, maka penyidik dan penuntut memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi Korban.<sup>26</sup> Mekanisme pengajuan perolehan kompensasi tersebut yaitu diajukan oleh Korban kepada Pengadilan melalui LPSK. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar kasus dapat diselesaikan secara hukum. Pendampingan ini dapat dilakukan mulai dari pendampingan pelaporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, koordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga pendampingan korban.<sup>27</sup>

Dengan dalih tugas dan fungsi pada (LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya Korban merasa rumit dengan persyaratan serta mekanisme dalam memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban dan/atau Keluarga Korban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-hak atau asas yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan Anak. Kompensasi yang berkarakter perdata diberikan proses peradilan pidana dengan penggabungan ganti kerugian. "Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada Pelaku melalui pengadilan. Hal ini merupakan bentuk penemuan atau implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam

menjalankan tugas dalam melindungi korban dan mencegah timbulnya pada kejahatan."<sup>28</sup> Namun dari beberapa peraturan mengenai "pemberian hak restitusi bagi korban" tidak tercantum pada sistem peradilan Anak, hanya saja dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak Korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi dengan kesepakatan persetujuan korban dan/atau keluarga korban pada nilai kerugian, dan ganti kerugian tersebut dapat digabungkan dengan perkara pidana yang dijalani sesuai pada KUHP UU Nomer 8 Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa yaitu: Jika suatu perbuatan yang mendasarkan ketika dalam dakwaan pada suatu perkara mulai dari pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan digabungkannya perkara gugatan ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana yang dijalani. Maksud dari kerugian bagi orang lain itu yaitu bagi Korban kejahatan Tindak Pidana.<sup>29</sup>

### 3. Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.<sup>30</sup> Pemberian kompensasi berhak diberikan pada kasus "HAM yang Berat, korban pelanggaran yang berat meliputi korban pada tindak pidana teror atau terorisme, pada korban tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi, serta pada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan atau cabul pada Anak dan Korban penganiayaan berat. Pemberian kompensasi tersebut tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini kejahatan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melalui lembaga LPSK. Pemberian kompensasi tersebut didapatkan berdasarkan

<sup>24</sup> Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Tahun 2016 Nomer 13

<sup>25</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana : yang berbunyi Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: a. penyidikan; atau b. penuntutan.

<sup>26</sup> Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>27</sup> Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016, 12.

<sup>28</sup> Maya Indah. *Op. Cit.* Catatan No. 2, 138.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>30</sup> Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat pada pasal 7 yang berbunyi Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.<sup>31</sup>

Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>32</sup> Pemberian kompensasi tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan pemberian kompensasi masih menggunakan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, sehingga pemberian kompensasi pada Anak Korban kurang memenuhi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Untuk pengajuan memperoleh Kompensasi terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemudian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan tersebut dilakukan pada saat sebelum dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum.

Atas persepektif tersebut apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Anak Korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan Anak. Bentuk perlindungan

Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.<sup>33</sup> Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban diantaranya yaitu :

**Pertama**, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srt pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa :

a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan; b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.<sup>34</sup>

**Kedua**, Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai “Hak restitusi anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h”.

“Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.”<sup>35</sup>

**Ketiga**, Secara Implementasi terdapat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>32</sup> Maya Indah. *Op Cit*.138.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>34</sup> Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Tahun 2016 Nomer 13.

<sup>35</sup> *Ibid*

Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan Saksi Korban.

Tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak Korban diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98 Ayat (1), memberi kesempatan kepada Korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, namun pasal tersebut terdapat pembatasan yang tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tidak mengatur mengenai ganti kerugian pada kepentingan korban, namun hanya berorientasi pada Pelaku. Begitupun juga lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang jarang sekali memberikan sanksi khusus permohonan gugatan ganti kerugian kepada Pelaku untuk Korban, dikarenakan lembaga pemerintahan yang fungsinya hanya untuk melakukan penuntutan pidana, membuat aturan atau pedoman keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan melalui administrasi pembuktian pada proses peradilan.

Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap Korban Anak bahwa konsep peranan korban justru bisa menjadi suatu hal yang rancu karena kesalahan penafsiran dari peranan Korban pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dapat dikemukakan bahwa peranan korban dalam unsur tindak pidana dapat dikaji dari pertanggungjawaban pidana kepada Pelaku. Beberapa hambatan serta kelemahan dalam KUHP serta KUHAP dalam sistem peradilan pidana mengenai pemberian ganti rugi yang masih berorientasi pada Pelaku kejahatan dibandingkan pada Korban kejahatan. Sehingga peraturan perundang-undangan pada

Perlindungan Korban untuk sekarang ini kurang relevan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi peraturan padapemenuhan hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban dalam beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Penyidikan dan Penyelidikan :

Lembaga kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Lembaga Perlindungan Anak, serta Lembaga Bantuan Hukum bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hak-hak Korban dan/atau mendampingi Korban.

b. Tahap Penuntutan

Kejaksaan bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hak-hak Korban, mendampingi Korban serta ketentuan untuk memperhatikan hak-hak Korban pada tahap tuntutan.

c. Tahap Putusan

Hakim bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hak-hak Korban, tidak ada sanksi pidana ganti kerugian, tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan putusan ganti kerugian maupun kompensasi yang diberikan kepada Korban Anak dalam perkara pidana.

Perspektif KUHP yang *offender oriented* kurang diimbangi dengan *victim oriented* kajian hukum pidana yang demikian akan berat sebelah yang tampak fokus pada perbuatan, pembuat, dan pidana.<sup>36</sup> Berdasarkan pembuat dan korban pada proses terjadinya tindak pidana dan kontribusi Pelaku untuk memperbaiki korban atau keluarga korban merupakan sentral pada viktimologi yang berarti latar belakang maksud adalah pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan Perlindungan Korban dalam pemenuhan hak-hak Korban yang begitu minim serta limitatif pada KUHP yang tidak mencantumkan secara jelas. Maka Hakim yang hanya berfikir secara legalistik formal, tidak berani dalam melakukan terobosan baru dalam memberikan suatu keputusan alternatif sebagai keadilan yang substantif untuk memberi perlindungan Korban. Dalam artian pemahaman hakim untuk menjembatani rasa keadilan dan

<sup>36</sup> Soedarto. *Hukum Pidana*. Yayasan Soedarto Fak. Hukum UNDIP, Semarang. 1990. 86

relevansi sosial dari hukum yang dimintakan adalah melalui putusan-putusannya.

## **B. Putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak Pidana Pencabulan sendiri adalah segala bentuk perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan pencabulan.<sup>37</sup> Sehingga bagi Peneliti bahwa tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari kenikmatan secara seksual dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dengan cara mengosok, mengelus-elus, memegang, dan mencium merupakan Tindak Pidana Pencabulan. Tindak Pidana Pencabulan termuat dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal tersebut Terdapat pada bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan memaksa. Namun berbeda lagi apabila hal tersebut dilakukan dengan unsur subyek lain seperti dalam keadaan pingsan dan dilakukan pada seseorang yang belum usia 15 (Lima Belas) Tahun atau belum cukup untuk dikawin maka perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) Tahun penjara.

Demikian pula terdapat alternatif lain pada perbuatan Tindak Pidana Pencabulan yaitu pada usia Anak yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatur mengenai sanksi bagi Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terdapat jenis istilah mengenai pencabulan diantaranya yaitu :

- a. *Exhibitionism* (sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain);
- b. *Voyeurism* (mencium seseorang dengan bernaafsu);
- c. *Fondling* (mengelus/ meraba alat kelamin seseorang);
- d. *Fellatio* (memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut).<sup>38</sup>

Pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus Pelaku melanggar pasal 82 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dengan memerintahkan agar Pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan dengan syarat khusus supaya Anak menjalani 10 (bulan) Pembinaan di dalam Lembaga Sosial dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Bagi Pelaku terdapat beberapa macam perlindungan dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara *Diversi*<sup>39</sup> maupun penyelesaian perkara secara *Restoratif*<sup>40</sup>. Dikarenakan Pelaku juga merupakan seorang Anak-Anak, maka dalam keterangan orang tua Anak dipersidangkan dihubungkan dengan laporan LITMAS dari Bapas Klas II Pekanbaru yang menyarankan supaya anak dibina dan di didik di Lembaga

<sup>38</sup> Leden Marpaung *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 64.

<sup>39</sup> Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>40</sup> Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>37</sup> S.R.Sianturi. *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianannya*. Alumni Ahaen Patehaem, Jakarta, 1983, 235.



Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru, yang bertujuan:

- Anak masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi;
- Orang tua Anak mendukung keputusan Anak ditipkan di LPKS;
- Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Sehingga terhadap Pelaku dijatuhkan pidana bersyarat sebagai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf a anagka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr. Namun pada putusan tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana cabul. Anak Korban menderita luka memar pada Anus, yang lebih dirasa putusan tersebut memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materiel kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis bagi diri Anak Korban, bahkan sampai pada lingkungan Keluarga sampai Masyarakat apabila Korban tidak segera mendapat hak-haknya seperti pemberian ganti kerugian restitusi, kompensasi serta rehabilitasi.

Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan Asas-asas pada sistem perlindungan Anak atau *inkonsistensi*<sup>41</sup> dalam pelaksanaan perkara pidana terutama pada Korban pencabulan bagi Anak. Peraturan mengenai Perlindungan Anak Korban terdapat hak-hak Korban dalam peradilan pidana yaitu meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi dan Rehabilitasi.

Sedangkan perlindungan Korban pada UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Hal ini Anak sebagai Pihak Korban dan/atau Anak berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak Korban dan/atau Saksi

yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana lebih khusus terdapat pada PP Nomer 43 Tahun 2017 yang merupakan peraturan yang memuat mengenai pemenuhan hak-hak Anak Korban dalam tindak pidana, yaitu yang tercantum Pada Pasal 2 Ayat (1) PP Nomer 43 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menjadi Korban tindak pidana Anak maka Anak Korban berhak memperoleh ganti kerugian (Restitusi). Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban tersebut mendasarkan pada PP Tahun 2017 Nomor 43 yang diharapkan dapat meringankan masalah serta mengurangi beban bagi pihak Anak Korban dalam mencapai tegaknya keadilan bagi Anak Korban yang telah menjadi Korban kejahatan Tindak Pidana Cabul. Namun hal tersebut tidak tercantum dan termuat dalam putusan Pengadilan Pekanbaru perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, Sehingga putusan tidak mencerminkan nilai keadilan bagi Anak Korban.

Perlohen hak Anak Korban mendapatkan kompensasi juga tidak termuat dalam Putusan Pengadilan seperti pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Korban. Mekanisme pengajuan perolehan Ganti Kerugian dan kompensasi tersebut yaitu diajukan oleh korban kepada Pengadilan melalui LPSK. Dengan dalih tugas dan fungsi pada (LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya secara *real* Korban merasa rumit dengan persyaratan serta meknisme dalam memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban dan/atau Keluarga Koban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-hak atau asas yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan Anak.

Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk lebih aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, dalam hal menanyakan kepada penyidik terkait dengan adanya tindak pidana atau meninggalkan pesan kepada penyidik apabila ada *Visum et Repertum* (Keterangan tertulis oleh Dokter) tindak pidana segera memberitahu kepada LPSK. Nantinya, LPSK

<sup>41</sup> Artinya “Tidak selaras atau tidak sesuai asas”, Surawan Maktinus, Kamus Terapan, Persada Media Pustaka, Jakarta, 2008, 30

agar nantinya lembaga perlindungan saksi dan korban aktif untuk mendatangi pelaku terkait meminta ganti kerugian dari pelaku maupun dari keluarga pelaku. Hal ini merupakan wujud perlindungan yang ideal terhadap korban ke depan.<sup>42</sup>

Ketidak *inkonsistensi* tersebut terlihat pada ketentuan pidana bersyarat dalam UU Perlindungan Anak tidak menjamin korban secara otomatis dapat memperoleh ganti kerugian apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sebab walaupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat, namun tidak ada kewajiban bagi Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk mencantumkan syarat khusus pada putusan.<sup>43</sup> Hal ini merupakan implikasi dari formulasi dari Pasal 98 KUHAP serta peraturan mengenai Perlindungan Korban pada proses peradilan yang tidak memuat pedoman pembedaan ganti kerugian sehingga mendudukkan korban sebagai *forgotten person*.

Dalam kesimpulannya bahwa hak dan eksistensi terhadap Anak Korban belum diberdayakan secara maksimal dalam proses pidana, yang dalam tuntutan jaksa tidak pernah memberikan tuntutan ganti kerugian sertapertimbangan Hakim yang menempatkan kedudukan dan eksistensi korban Anak dalam peradilan pidana sebagai pihak yang dirugikan yang tidak memiliki arti, yang berbeda jauh dari asas-asas pada sistem peradilan Anak. Putusan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dalam paradigma perlindungan Korban Anak telah dikontruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu belum adanya pasal pada KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan penegakkan hukum yaitu pada kewajiban untuk memberikan tuntutan ganti kerugian pada putusan Pengadilan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan Korban Anak mengalami pendegradasian karena kekurangan dan hambatan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respons pada pemberian ganti kerugian terhadap Korban Anak.

Disisi lain dalam pertimbangan Hakim tidak ada sanksi pidana bagi Pelaku untuk mengganti kerugian pada Korban yang dikarenakan tidak ada dalam tuntutan Jaksa,

ganti kerugian bisa diajukan ketika Korban mengajukan permohonan ganti kerugian, serta tidak ada kewajiban pada putusan untuk penyertaan tuntutan ganti kerugian Korban pada perkara pidana. Berdasar tersebut Hakim sangatlah berfikir legalistik formal, tanpa memberi pemikiran keadilan yang substansif untuk memberi perlindungan pada Korban. Putusan tersebut masih belum tercapai dalam penerapan pada Perlindungan Anak Korban, pada setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih condong pada pendekatan secara *Retributive Justice*<sup>44</sup> yang lebih pada perlindungan kepada Pelaku dan mengabaikan hak-hak terhadap Korban Anak.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr yang memutuskan bahwa Pelaku terbukti bersalah yaitu mendasarkan Visum Et Repertum pada Nomor : 1444/XII/2016/RSB tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Widya Mastuty Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan kejahatan tersebut menyebabkan memar pada lubang anus yang menghilang akibat kekerasan tumpul. Dari putusan tersebut merupakan dalam tindak pidana tidak lepas dengan adanya korban dari akibat kejahatan Pelaku sebagai orang yang dirugikan yang berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan kepada Korban Anak ataupun Keluarga Korban Anak.

Pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr memutuskan Pelaku dengan memerhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memutuskan Pelaku kejahatan secara kumulatif dikarenakan Pelaku juga seorang Anak dibawah umur namun putusan tersebut tidak sama sekali menyinggung tentang pemenuhan hak Korban Anak, yang mana putusan tersebut melanggar secara asas hukum sistim peradilan anak yaitu diskriminasi atau ketidakadilan dalam

---

<sup>42</sup> Jurnal pada: [dspace.uin.ac.id/MuhammadKhoirulHuda/FakultasHukum/UniversitasIslamIndonesiaYogyakarta/2018/Tesis.PerindunganHukumKorbanKejahatanditinjauDariHukumProgresif](https://dspace.uin.ac.id/MuhammadKhoirulHuda/FakultasHukum/UniversitasIslamIndonesiaYogyakarta/2018/Tesis.PerindunganHukumKorbanKejahatanditinjauDariHukumProgresif).

<sup>43</sup> Maya Indah, *Op.Cit*, Catatan No.2. 159.

<sup>44</sup> *Retributive Justice* artinya (menekankan keadilan pada pembalasan) Jurnal Veritas Et Justicia, Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 2-Nomor-2-304, Zenny Rezania Dewantary, 15.

memutus perkara pidana antara hak Pelaku dengan Korban. Padahal jika dilihat dari pokok putusan tersebut, Hakim memerhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Undang-Undang tersebut pada Pasal 71 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur hak setiap Anak yang menjadi Korban Kejahatan seksual seperti tindak pidana pecabulan yang berhak atas perolehan ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan, yang pada akhirnya Hakim mengabaikan pasal tersebut. Bahkan putusan tersebut yang mana penegak hukum mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mengkaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh hak-haknya sebagai Korban, serta akses untuk mengetahui informasi mengenai hak-hak Korban selama proses pengadilan sebagaimana mestinya pada putusan Pengadilan. Oleh karena itu, selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap Korban Anak bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat *fakultatif* yang berarti Ganti Kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau *imperatif*. Hal ini yang menjadi ketidak *inkonsistensinya* serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak.

Hal ini juga yang dapat menggambarkan bahwa Korban dalam interaksi penegakkan hukum terhadap peradilan pidana menimbulkan viktimisasi yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Korban Anak. Maka, Hakim pada proses peradilan harus memperhatikan serta mempertimbangkan bagaimana dampak korban atas kerugian yang dialami, tidak hanya kerugian fisik korban namun juga kerugian psikologis korban. Korban seyogianya mendapatkan rehabilitasi psikologis namun dalam hal ini KUHP belum mampu memberikan perlindungan.<sup>45</sup>

Analisis pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr secara interpretasi hukum, disini Hakim tidak diperkenankan

melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di “dalam undang-undang itu sendiri”. Artinya adalah “ketentuan pasal” yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Hukum Acara Pidana, Perlindungan Anak, pelaksanaan dan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, Sistem Peradilan Pidana Anak serta pelaksanaan restitusi Korban Anak, dapat memberikan penjelasan mengenai maksud Pelindungan Korban Anak. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan proses peradilan pidana (pra-adjudikasi) ini, KUHAP memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Kepolisian, yaitu diberikan “peran” (role) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*).<sup>46</sup>

Hal ini dapat menyebabkan anomali dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, bahwa secara keseluruhan dalam melaksanakan permohonan ganti kerugian (restitusi) melalui tahap penyidikan, penyelidikan, hingga sampai penuntutan menjadi gugur dikarenakan tidak diaturnya secara jelas sanksi ganti kerugian terhadap Pelaku serta kewajiban penegak hukum dalam memberikan informasi yang menjadi hak Korban pada proses peradilan pidana pada KUHP, KUHAP serta peraturan lainnya. Sehingga, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat *inkonsistensi* yang menjadikan kekaburan hukum (*vaqueness*) pada proses peradilan Anak.

Berdasarkan diatas terminologi diatas dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap Korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr haruslah bersifat progresif

<sup>45</sup> Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, dkk *Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual*. Vol. 22, No. 2, (Agustus, 2020), pp. 345-362. 355

<sup>46</sup> Antoni. *Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif*. Nurani, Vol. 19, No. 2, Desember 2019: 237-250. 238

diimbangi dengan penemuan hukum dengan penafsirannya yang dapat memecahkan permasalahan melalui putusan-putusan yang berkepastian hukum, bermanfaat serta berkeadilan.

### C. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban Pada Proses Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak secara Progresif

Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia”, yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.<sup>47</sup>

Untuk menerapkan hukum progresif pada pemenuhan hak perlindungan Korban Anak yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan penelitian. *Pertama*, studi kasus (*case study*), pada penelitian ini fakta materiel pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi rujukan dalam membangun argumentasi. Di dalam *civil law* hukum Indonesia dilihat konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Dengan kata lain ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang menopang argumentasi hukum pada fakta materiel yaitu pada kasus (putusan pengadilan). *Kedua*, Pendekatan Konseptual, pendekatan ini manakala dilakukan memang belum ada aturan hukum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum, serta konsep yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>48</sup> *Ketiga*, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek dalam menganalisis permasalahan tersebut. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti pada pemahaman hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mencerminkan gagasan pada Asas Keadilan.

<sup>47</sup> Diana E. Rondonuwu, *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*. *Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, 1.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016, 177-178.

Sehingga Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban Pada Proses Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak secara Progresif dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. *Cross Examination*

Untuk menyempurnakan KUHAP mengenai hak-hak Anak Korban Restitusi, Kompensasi maupun Rehabilitasi dalam pandangan hukum Progresif perlu adanya *cross examination*<sup>49</sup> yang merupakan adopsi dari sistem *anglo saxon* perlu dirumuskan dalam KUHAP.<sup>50</sup> Maksud proses tersebut ialah untuk memperoleh pemenuhan hak-hak Korban yang lebih memerhatikan kepentingan Anak Korban yaitu melalui Jaksa yang termuat dalam tuntutan Jaksa pada proses peradilan Anak, atas pertimbangan tersebut Hakim dapat memuat pemenuhan Anak Korban putusan tersebut tanpa menunggu putusan terlebih dahulu dan tanpa harus mengajukan kepada LPSK. Sehingga hak restitusi atau ganti kerugian dapat dijalankan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. selain itu dapat juga melalui pendampingan hukum khusus pada Anak Korban dibandingkan dengan LPSK yang bukan merupakan aparat penegak hukum.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment offenders* readaptasi sosial masyarakat dan lain-lain. Pengelolaan dalam peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem menerima kedudukannya sebagai subsistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat.<sup>51</sup> Sehingga bekerjanya peradilan pidana harus difungsikan sebagai administrasi keadilan yang harus mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga maupun pranatanya secara adil di masyarakat.<sup>52</sup> Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani perkara

<sup>49</sup> *Cross examination* merupakan proses Tanya jawab antara penegak hukum, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela dengan Terdakwa, M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hlm 497.

<sup>50</sup> Maya Indah. *Op.Cit*, Catatan No.2,180.

<sup>51</sup> Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995). 7.

<sup>52</sup> Maya Indah. *Op.Cit*. Catatan No.2, 9.



pidana merupakan sebagai suatu birokrasi subsistem sosial yang bekerja dalam lingkungannya, dan mempunyai cara dalam mencapai tujuan. Hukum tersebut tertuang dalam landasan normatif yaitu KUHP dan KUHP, serta perundang-undangan lainnya sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana.

Kelemahan KUHP tidak memperkenankan kepada Korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat immateriil secara jelas dan terbatas, dalam pasal 99 Ayat 2 dan Pasal 100 KUHP menyatakan bahwa penggantian biaya ini hanya pada penetapan hukuman penggantian yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka pupus sudah harapan Korban maupun Keluarga Korban sebagai pihak yang dirugikan, belum lagi apabila pihak yang dirugikan tidak mengetahui mengenai informasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Untuk itulah perlunya *Cross examination* diperlukan sebagai penilaian Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian Korban pada Proses Peradilan Pidana. Hal ini juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk memperhatikan kepentingan Korban, disamping Hak Korban perlu untuk didampingi Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum.

## **2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan(*systematic resocialization of the offender*)**

Restitusi/Ganti Kerugian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu diterapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Secara Konkret Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dimaksudkan agar orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, serta tidak memboroskan sumber daya yang terdapat selama proses pemeriksaan.<sup>53</sup> Kaitannya dengan keberadaan secara cepat dan sederhana sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terbebani proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Korban.

Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban menjadikan hak-hak Anak Korban melalui LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 menjadi *fakultatif* karena sifatnya bergantung pada keputusan lembaga tersebut. Hak-hak seyogyanya bersifat fundamenal tanpa mendasar pada keputusan LPSK. Hal ini tentu bertentangan dengan KUHP terutama pada pasal 98 yang mengatur penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 49 mengenai putusan ganti kerugian yang menyatakan bahwa melalui tuntutan jaksa yang kemudian Hakim menetapkan putusannya mengenai jenis serta jumlah ganti kerugian. Dari pasal tersebut lebih tercapainya hak-hak pemenuhan perlindungan Anak Korban khususnya Anak sebagai Korban kekerasan seksual yaitu cabul. Aturan UU mengenai sistem peradilan Anak serta PP mengenai pelaksanaan Restitusi Anak Korban seharusnya disesuaikan dengan sistem peradilan yang progresif agar terciptanya rasa keadilan.

Bekerjanya peradilan pidana Anak yang sesuai keadilan pada Anak Korban diantaranya yaitu meliputi *response selectetd assasment* dari penegak hukum yang dimulai dari kepolisian, LPSK serta Penuntut Umum sebagai extended responses yang akan disampaikan pada proses peradilan pidana Anak. Pelayanan diadakan mengikuti ketersediaan keahlian, sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada. Jika tidak merasa sanggup melayani karena keterbatasan tenaga, fasilitas ataupun dana, biasanya mencari kenalan lain dan merujuknya kesana. Proses rujukan dilakukan atas dasar kepercayaan atau hubungan baik beberapa orang di antara lembaga-lembaga tersebut.<sup>54</sup>

Perspektif diatas memunculkan pentingnya aspek akuntabilitas untuk peradilan pidana dan implikasinya terhadap kontrol dan tanggung jawab institusi. Hal tersebut dapat dikaji dari perilaku penegak hukum, keputusannya atau peristiwa dalam rangka pertanggungjawaban moral dan

<sup>53</sup> Marlina dan AsmiatiZuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama. 2015,123.

<sup>54</sup> Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016. Hlm 6.

hukum yang merefleksikan fungsi perlindungan, pengayoman, dan keadilan dari proses peradilan pidana, yang tentunya dapat dipertegas dan dijiwai dalam aturan perundang-undangan. Namun, dalam rangka pencapaian perlindungan Anak Korban maka yang perlu diperhatikan adalah keadilan substansial yang memperhatikan nilai-nilai humanisme.

Pengakomodasian pemenuhan ganti kerugian pada pemberian hak-hak Anak korban secara substansial memiliki konsekuensi bahwa politik hukum pidana bertujuan pada konsep *the systematic resocialization of the offender* yang mengikhtiarkan perlindungan pada kejahatan yang mencakup haknya sebagai manusia, walaupun ia harus membayar kejahatan yang dilakukannya.<sup>55</sup> Keseimbangan kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak asasinya adalah menjadi perspektif bekerjanya peradilan pidana.

Secara Progressive, untuk menerapkan konsep *the systematic resocialization of the offender* perlu dipertegas pada Rancangan Aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan ruang pada Pasal mengenai jenis ganti kerugian yang meliputi : a) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; b) layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban; c) permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan d) Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban.

Sebagai tata cara pelaksanaannya dapat mengadopsi Pasal 48 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam Penuntutannya, Penuntut Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan. Serta terdapat Putusan Ganti Kerugian yang dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, yang majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.

Maka dari itu, pada aturan tersebut perlu untuk diterbitkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pelindungan Korban Anak serta pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban sebagai hukum pidana khusus yang

nantinya akan memunculkan terobosan dalam system peradilan pidana dengan tujuan agar Korban khususnya Anak dapat mengikuti proses peradilan pidana yang berpusat pada upaya pemenuhan hak Korban dan upaya mendekatkan Korban kepada keadilan. Selain merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan retributive sekaligus rehabilitatif, pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.<sup>56</sup> Mengingat tindak pidana pencabulan bagi Anak Korban yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dalam keadilan dengan Pelaku kejahatan pada proses Peradilan terlebih apabila Korban sebatas Saksi, diterbitkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pelindungan Korban Anak serta pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban akan membangun pembaharuan hukum khususnya terkait *social defence* perlindungan Korban dan pemulihan bagi korban pencabulan bagi siapapun korban, termasuk anak. Kurang terbukanya pada lembaga litigasi terhadap lembaga-lembaga non litigasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya masukan yang berupa aspek yang terkait dalam proses pembuatan keputusan. Dari keputusan hukum akhirnya hanya mengacu pada pertimbangan yuridis formal yang kurang memperhatikan konteks dinamis masyarakat dan korban.<sup>57</sup> Masukan yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah yang mendalami masalah kekerasan terhadap Anak akan memberikan nuansa dan pengayaan dalam proses pembuatan keputusan sehingga putusan hukum relative lebih dapat memuaskan tuntutan keadilan yang diharapkan korban.

---

<sup>55</sup> Ancel, *Social Defence a Modern Approach to Criminal Problems*, London :Foreward Leon. Trans J. 17.

<sup>56</sup> Materi mengenai Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAKBAG%207.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAKBAG%207.pdf)

<sup>57</sup> Josephin Mareta, *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism Of Law Enforcement In Protecting The R)*. Jurnal Hak Asasi Manusia . Volume 7, Nomor 2, Desember 2016 J. Hlm 16.

## KESIMPULAN

Hak dan eksistensi terhadap Anak Korban belum diberdayakan secara maksimal dalam proses pidana Anak, yang dalam tuntutan jaksa tidak pernah memberikan tuntutan ganti kerugian karena memang dalam pertimbangan Jaksa tidak ada kewajiban untuk menuntut ganti kerugian. Disisi lain dalam pertimbangan Hakim tidak ada sanksi pidana bagi Pelaku untuk mengganti kerugian pada Korban yang dikarenakan tidak ada dalam tuntutan Jaksa, ganti kerugian bisa diajukan ketika Korban mengajukan permohonan ganti kerugian, serta tidak ada kewajiban pada putusan untuk penyertaan tuntutan ganti kerugian Korban pada perkara pidana, sehingga hak Anak Korban pada peraturan perlindungan Anak serta peradilan pidana Anak terbatas. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban Pada Proses Peradilan Tindak Pidana Cabul Anak secara Progresif yaitu **Pertama**, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat *inkonsistensi* yang menjadikan kekaburan hukum (*vaqueness*) pada proses peradilan Anak, yang secara keseluruhan dalam melaksanakan permohonan ganti kerugian (restitusi) melalui tahap penyidikan, penyelidikan, hingga sampai penuntutan menjadi gugur dikarenakan tidak diaturnya secara jelas sanksi ganti kerugian terhadap Pelaku serta kewajiban penegak hukum dalam memberikan informasi yang menjadi hak Korban pada proses peradilan pidana pada KUHP, KUHPA serta peraturan lainnya. Sehingga pengaturan mengenai pemenuhan ganti kerugian Anak Korban pencabulan masih terbatas. **Kedua**, secara Progresif untuk menyempurnakan KUHPA dalam pemenuhan hak-hak Anak Korban Ganti kerugian, Kompensasi maupun Rehabilitasi dalam pandangan hukum Progresif perlu adanya *cross examination* sebagai penilaian Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian Korban pada Proses Peradilan Pidana. Hal ini juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk memperhatikan kepentingan Korban, disamping Hak Korban perlu untuk didampingi Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum. Selanjutnya secara Progressive untuk menerapkan konsep *the systematic resocialization of the offender* perlu dipertegas pada rancangan aturan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dengan memberikan ruang pada Pasal mengenai jenis ganti kerugian yang meliputi : a) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; b) layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban; c) permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan d) Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban. Dengan sebagai tata cara pelaksanaannya dapat mengadopsi Pasal 48 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam Penuntutannya, Penuntut Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan. Serta terdapat Putusan Ganti Kerugian yang dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, yang majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.

## SARAN

Memberikan perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana pencabulan terhadap Anak perlu merumuskan kembali pasal-pasal yang secara khusus menjelaskan tentang ketentuan perlindungan anak korban seperti undang-undang yang mengatur tentang korban yang mendapatkan permohonan restitusi ke pengadilan tanpa syarat yang harus dipenuhi oleh Pengadilan. Tentunya untuk mencapai upaya tersebut, lembaga perlindungan saksi dan korban perlu lebih aktif setelah menerima laporan bahwa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban. Dan melaksanakan tata cara mengadopsi Pasal 48 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban, yakni tentang Hak Anak Korban dalam Penuntutannya, Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan restitusi dalam surat tuntutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sebagai Penulis Artikel Jurnal mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lucky Endrawati (Dr., S.H., M.Hum) dan Bapak Setiawan Noerdajasakti (Dr, S.H., M.H.) selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang serta rekan-rekan Bestari yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancel. *Social Defence a Modern Approach to*. London: Foreward Leon.
- Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*: Akademika Presindo, Jakarta. 1989.
- Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali." *Kertha Patrika Volume 38*, 2016.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesoponan*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Gosita, Arif. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju., 1996.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maktinus, Surawan. *Kamus Terapan*. Jakarta: Persada Media Pustaka, 2008.
- Marlina, dan Asmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2005: Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Raharjo, Satjipto. "Menuju Produk Hukum Progresif." *Makalah Diskusi Terbatas Pada Fakultas Hukum Undip Semarang*, 24 Juni 2004.
- S.R.Sianturi. *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut*. Jakarta: Alumni Ahaen Patehaem, 1983.
- Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sinolongan. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## JURNAL

- Anto. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif." *Nurani, Vol. 19*, 2019 No. 2.
- Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali." *Kertha Patrika Volume 38*, 2016: Nomor 12.
- Dewantary, Zenny Rezanita. "Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Veritas Et Justicia*, Volume 2-Nomor-2-304: 1.E.
- Huda, Muhammad Khoirul. "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan ditinjau Dari Hukum Progresif." *Tesis Universitas Islam Indonesia Fkultas Hukum*, 2018: 1.
- Mareta, Josefhin. "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN)." *Jurnal Penelitian HAM*, 2016.
- Prawati, Ratna. "Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen." <http://eprints.ums.ac.id/38547/1/9RR.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, 2014.
- Raharjo, Satjipto. "Menuju Produk Hukum Progresif." *Makalah Diskusi Terbatas Pada Fakultas Hukum Undip Semarang*, 24 Juni 2004: 6-9.
- Rondonuwu, Diana E. "Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Pengetahuan
- Utami, Penny Naluria. "OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU." *Jurnal Penelitian HAM*, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah, Peraturan. *Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;.*

Undang-Undang. *Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tahun 2016.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 31 tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

\_\_\_\_\_. *Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

## PUTUSAN PENGADILAN

*PUTUSAN.* Nomor  
13/Pid.SusAnak/2017/PN.Pbr (Pengadilan  
Pekanbaru, 20 April 2017).

## WEBSITE

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf)

KOSONG